

Abstrak

Sukmaningtyas, Prima Ayu (2025) "**Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti Elektronik (Screenshot) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt)**" Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Pembimbing: Weppy Susetiyo, S.H., M.H. dan Erwin Widiandono, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pornografi, Bukti Digital, Anak di Bawah Umur

Kemajuan teknologi informasi di era digital dewasa ini memberikan pengaruh signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah tindak pidana. Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah penyebaran dokumen digital asusila melalui media digital, yang bahkan melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian moral dan psikologis, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian hukum, khususnya ketika pelaku masih di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik berupa screenshot dalam pembuktian perkara tindak pidana pornografi, dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian digital dalam perkara pidana. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus (case approach) guna mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara pidana yang melibatkan alat bukti digital.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti digital seperti video, percakapan elektronik, atau dokumen digital, tetapi juga memperhatikan kelengkapan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara pidana. Alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat. Selain itu, majelis hakim turut mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku dan faktor lingkungan sosialnya. Pertimbangan ini meskipun bersifat sosiologis, turut berperan dalam memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan alat bukti digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum acara pidana telah mengatur jenis dan kekuatan alat bukti, dalam praktiknya hakim tetap melakukan penafsiran hukum secara komprehensif, agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek legal-formal, melainkan juga memuat keadilan substantif.

Abstract

Sukmaningtyas, Prima Ayu. (2025). "**Juridical Analysis of Electronic Evidence (Screenshot) in the Proof of Criminal Cases Involving the Distribution of Pornographic Content: A Case Study of the Blitar District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.**" Undergraduate Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Islamic University of Balitar, Blitar. Supervisors: Weppy Susetiyo, S.H., M.H. and Erwin Widiandono, S.H., M.H.

Keywords: Pornography, Digital Evidence, Minors

The advancement of information technology in today's digital era has brought significant influence across various sectors of life, including in the field of criminal acts. One of the crimes that frequently occurs is the dissemination of pornographic content through digital media, which even involves minors as perpetrators. This crime not only causes moral and psychological harm but also poses unique challenges in the legal proof process, especially when the perpetrator is underage.

This research aims to analyze the legal standing and evidentiary strength of electronic evidence in the form of screenshots in proving pornography crime cases, with a study on the Decision of the Blitar District Court Number 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.

The method applied in this research is normative legal research, which focuses on the study of legal materials, including legislation, court decisions (jurisprudence), and legal doctrines related to digital evidence in criminal cases. The approaches used are the statutory approach and the case approach, to examine how legal provisions are applied by the panel of judges in criminal cases involving digital evidence.

Based on the results of the research, it was found that in rendering decisions in criminal cases involving minors as perpetrators, judges do not solely rely on digital evidence such as video recordings, electronic conversations, or other digital documents. Judges also consider the completeness of other evidence as regulated in the criminal procedural law, such as witness testimony, the defendant's statement, and documentary evidence. Furthermore, the panel of judges takes into account the personal circumstances of the perpetrator and social environmental factors. Although these considerations are sociological in nature, they play a role in strengthening the legal reasoning in the decision rendered.

Therefore, court decisions in criminal cases involving digital evidence are not solely repressive but also uphold a principle of justice that balances legal certainty and humanitarian values. This illustrates that although the criminal procedural law regulates the types and strength of evidence, in practice judges still carry out comprehensive legal interpretations to ensure that the decisions rendered fulfill not only legal-formal aspects but also substantive justice.